

Jurnal Ekonomi

VOLUME 26 / 3 / 2021

ISSN 0854 - 9842

E-ISSN 2580 - 4901

Dampak Rasio Keuangan Dan Pandemi COVID-19 Terhadap Kinerja Keuangan

Villy, Nuryasman MN

Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kebijakan Dividen Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI

Haura Raihana Tsani Effendi, Ferina Ainul Latiefa, Henny Setyo Lestari

Biaya Modal Perusahaan di Indonesia: Tanggung Jawab Sosial dan Tata Kelola Perusahaan

Amrie Firmansyah, Arifah Fibri Andriani, Moch.Luthfi Mahrus, Wahyudi Febrian, Pramuji Handar Jadi

Pengaruh Intellectual Capital dan Leverage Terhadap Financial Performance dengan Moderasi Firm Size

Viriany, Henny Wirianata

Dampak Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kebijakan Pembayaran Dividen Pada Perusahaan Manufaktur

Veren Velicia Natalie, Yunita Kusumaningrum, Henny Setyo Lestari

Faktor Penentu Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Kesehatan: Sebelum dan Saat Covid-19

Anindita Dresti Pinastika, Ferry Irawan

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rasio Keuangan Sebagai Prediktor Dari Kinerja Keuangan Perusahaan

Ringke Dirdia, Deci Novesa Carani, Henny Setyo Lestari

Pengaruh Credit Risk Management Pada Financial Performance Bank Konvensional Yang Terdaftar di BEI

Ervina, Vivi Nur Fatimah, Henny Setyo Lestari

Kontribusi Lingkungan Organisasi Terhadap Peningkatan Kualitas Aplikasi Keuangan Survey Pada

Perbankan BUMN

Lilis Puspitawati, Hilmi, Popy Gurning, Nanang Suryana

Keterkaitan Tata Kelola Perusahaan Non Manufaktur Terhadap Keputusan Dividen

Muhammad Rizki Zhafran, Latifah Herman, Henny Setyo Lestari

Editorial Address

Sekretariat Jurnal Ekonomi; Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara

Jln. Tanjung Duren Utara No. 1, Grogol, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11470

Telepon/Fax (021) 5655508-9 Ext.0326

Email submisipaper@fe.untar.ac.id

URL <https://www.ecojoin.org/index.php/EJE/index>



9 772580 490007

Jurnal Ekonomi

VOLUME 26 / 3 / 2021

ISSN 0854 - 9842

E-ISSN 2580 - 4901



Editorial Address

Sekretariat Jurnal Ekonomi; Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara
Jln. Tanjung Duren Utara No. 1, Grogol, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11470
Telepon/Fax (021) 5655508-9 Ext.0326

Email submisipaper@fe.untar.ac.id

URL <https://www.ecojoin.org/index.php/EJE/index>



9 772580 490007

PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PENDAPATAN DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

Nuryasman MN

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta

(Email: nuryasmanmn@gmail.com)

Abstract: Looking at the phenomenon that appears in the implimentation regional autonomy, the study sought to examine several issues, mainly related to the Gross Regional Domestic Product (PDRB) and regional economic growth (Growth), such as: The role and influence of local revenue (PAD) and Fund Balance (DAU, DAK, and DBHPBP) to the Gross Regional Domestic Product (PDRB). The role and influence of the PAD, DAU, PDRB, and DBHPBP on regional economic growth. This study attempted to analyze these two problems, using a panel data approach using Fixed Effect Model (FEM) and the Random Effect Model (REM), as well as data processing method using the Two-State Least Square (TSLS), the analysis period from 2005 to 2010 and object of research as much as 33 provinces.

From the analysis, the obtained results as follows: After conducting tests Hausmann (Hausmann Test) on both models (FEM and REM) model is the best to use Fixed Effect Model (FEM) with General Least Square by White Heterocedasticity, both for the problems first and the second one. For the first problem, obtain the relationship and influence positive and significant association between PAD, DAU and DBHPBP of PDRB, whereas DAK has a relationship and influence positive but not statistically significant of PDRB. Taken together all the independent variables (PAD, DAK, DAU and DBHPBP) contribute to changes in PDRB amounting to 97,50 % and the rest of 2,50 % influenced by other variables outside the model. For the second problem, PDRB, PAD, DAU and DBHPBP all statistically significantly affect economic growth, but only variable PAD which has a relationship and a negative effect on PDRB, while the other variables have a positive relationship and influence. Donations of all these variables together on economic growth is high at 99,30 % and the influence of other variables outside the model of only 0,70 %.

Keywords: Regional Autonomy, Fixed Effects Model, Random Effect Model, Balanced Funds, Two State Least Square and General Least Square by White Heterocedasticity.

Abstrak: Penelitian ini mencoba untuk meneliti beberapa isu yang terkait dengan pengaruh PAD, Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil) terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) serta dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi (*Growth*) Daerah. Dalam penelitian ini dianalisis 2 (dua) masalah yaitu: (1) Seberapa besar pengaruh serta kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBHP dan DBHBP) baik secara parsial maupun secara bersama-sama terhadap pendapatan daerah (PDRB)?; (2) Seberapa besar pengaruh serta kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHBP/Sumber Daya Alam) dan PDRB terhadap pertumbuhan ekonomi daerah baik secara parsial maupun secara bersama-sama?

Untuk analisis digunakan Model Fixed Efek (FEM) dan Model Random Efek (REM) serta untuk pengolahan data digunakan Two Stage Least Square (TSLS), periode analisis dari tahun 2005 sampai 2010 dengan jumlah objek penelitian 33 provinsi. Dari uji Hausmann (*Hausmann Test*) pada kedua model baik FEM dan REM, diperoleh hasil model terbaik yang dapat digunakan untuk melakukan prediksi adalah Fixed Effect Model (FEM) dengan General Least Square (GLS), baik untuk permasalahan pertama maupun kedua. Untuk masalah pertama ditemukan, hubungan dan pengaruh positif yang signifikan antara PAD, DAU dan DBHPBP (Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak) terhadap PDRB, sementara DAK memiliki hubungan dan pengaruh positif tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap PDRB. Secara bersama-sama semua variabel bebas (PAD, DAK dan Dana Bagi hasil) memiliki kontribusi terhadap PDRB sebesar 97,50 % dan sisanya 2,50 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Hasil untuk masalah kedua, PDRB, PAD, DAU dan DBHPBP secara statistik signifikan dalam mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi (*Growth*), tetapi hanya variabel PAD yang memiliki hubungan dan pengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sementara variabel bebas lainnya memiliki hubungan dan pengaruh yang positif. Sumbangan semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi sangat tinggi sebesar 99,30 %, sisanya sebesar 0,70 % disumbangkan oleh variabel yang berada diluar model.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Model Fixed Efek (Fixed Effect Model), Model Random Efek (Random Effect Model), Two Stage Least Square (TSLS) dan General Least Square (GLS).

PENDAHULUAN

Otonomi daerah di Indonesia yang telah berjalan lebih kurang 10 tahun, seharusnya bukan hanya sekedar pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah, tetapi seharusnya lebih dari itu seperti apa yang ditegaskan oleh Kaloh (2002), bahwa otonomi daerah harusnya didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah dan bukan otonomi "*daerah*" dalam pengertian wilayah/territorial tertentu di tingkat lokal. Otonomi daerah bukan hanya sekedar pelimpahan wewenang tetapi harus mampu untuk mendorong keikutsertaan (partisipasi) masyarakat daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi di daerahnya.

Berbagai harapan dalam pelaksanaan otonomi daerah serta desentralisasi bukanlah suatu hal yang mustahil jika otonomi dan desentralisasi tersebut didukung oleh berbagai faktor serta peranan dari berbagai pihak seperti, kemampuan sumber daya, pemahaman tentang konsep otonomi dan desentralisasi itu sendiri serta sistim keuangan yang transparan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah tidak akan terlepas dari sumber pembiayaan baik yang berasal dari daerah itu sendiri maupun dari luar daerah (pemerintah maupun swasta).

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber penerimaan daerah adalah Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) serta Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHBP) dan Lain-lain Pendapatan. Dalam mendukung sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah, seharusnya semua pengeluaran daerah dapat didanai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat dapat diminimalkan dan menjadikan daerah sebagai daerah yang

otonom sesungguhnya. Menurut Mahi (2005), selama tahun 2001–2003, peranan PAD terhadap pengeluaran rutin dan total pengeluaran APBD semakin menurun. Menurunnya peranan PAD terhadap pengeluaran rutin dan total pengeluaran APBD ini mengindikasikan bahwa telah terjadi peningkatan peranan mekanisme transfer pemerintah pusat melalui dana perimbangan kepada daerah.

Hasil ini tidak jauh berbeda dengan yang dipaparkan oleh Supatman (2010) selama 5 (tahun) antara tahun 2003–2007 komposisi dana perimbangan terus mengalami peningkatan dengan jumlah terbesar pada tahun 2007 sebesar Rp. 211.943,41 milyar yang mencapai 91,14 % dari total pendapatan daerah (seperti terlihat dalam tabel 1 berikut).

Tabel 1. Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2003 – 2007
(Dalam Milyar Rupiah)

Jenis Pendapatan	2003	2004	2005	2006	2007
1 PAD	8.602,62	9.463,69	10.023,22	13.961,95	14.110,00
Persentase Terhadap Pendapatan	7,73 %	7,98 %	8,03 %	6,70 %	6,07 %
2 Dana Perimbangan	93.754,63	104.580,76	110.525,58	191.851,48	211.943,41
Persentase Terhadap Pendapatan	84,24 %	88,18 %	88,51 %	92,01 %	91,14 %
2.1 DBHP	9.927,35	11.332,80	10.061,17	22.441,24	15.891,07
2.2 DBH SDA	10.403,49	11.091,17	11.779,29	18.708,11	21.007,11
2.3 DAU	70.230,35	73.328,85	78.627,03	128.898,20	147.928,79
2.4 DAK	3.193,44	3.022,21	4.225,95	11.772,60	16.950,41
2.5 Bagi Hasil Provinsi Lain-lain	-	5.805,72	5.832,15	10.031,34	10.166,03
3 Pendapatan Yang Sah	8.943,13	4.549,19	4.326,98	2.693,31	6.505,81
Total Pendapatan Daerah	111.300,39	118.593,64	124.875,77	208.506,75	232.559,21

Sumber : Supatman (2010)

Jika pertumbuhan ekonomi daerah membaik ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional juga semakin baik.

Supatman (2010), menyatakan pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang akan menyebabkan barang dan jasa bertambah dan selanjutnya akan mendorong peningkatan kemakmuran masyarakat. Peningkatan kemakmuran ini akan mendorong terjadinya peningkatan daya beli yang menuntut peningkatan akumulasi modal dan sumber daya lainnya baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

Perumusan **masalah**. Banyak faktor-faktor yang dapat menentukan dan mempengaruhi pendapatan daerah serta pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Namun dalam penelitian ini faktor yang akan diteliti lebih dibatasi kepada peranan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DAU, DAK dan DBHP serta DBHBP) terhadap PDRB serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan latarbelakang serta batasan masalah diatas, dalam penelitian ini diajukan masalah seperti berikut: (1) Seberapa besar pengaruh serta kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBHP dan DBHBP) baik secara parsial maupun secara bersama-sama terhadap pendapatan daerah (PDRB) ?; (2) Seberapa

besar pengaruh serta kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHBP/Sumber Daya Alam) dan PDRB terhadap pertumbuhan ekonomi daerah baik secara parsial maupun secara bersama-sama?

Tujuan Penelitian. Secara Umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui informasi tentang peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBHP dan DBHBP) dalam meningkatkan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) serta dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia dalam kurun waktu 2005 – 2010. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBHP dan DBHBP) terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) baik secara parsial maupun secara bersama-sama.; (2) Pengaruh dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHBP / Sumber Daya Alam) serta Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah baik secara parsial maupun secara bersama-sama.

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Halim (2002), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi asli suatu daerah. Beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah dapat dikelompokkan atas 4 (empat) jenis pendapatan yaitu: (1). Pajak Daerah, (2). Retribusi Daerah, (3). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan (4). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, besarnya Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26 % dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN (Pasal 27). Selanjutnya pendistribusian DAU untuk daerah seperti formula berikut (Supatman, 2010):

Tabel 2. Formula Penentuan Dana Alokasi Umum Untuk Daerah

Besarnya DAU	Besarnya DAU Untuk Provinsi	Besarnya DAU Untuk Kabupaten / Kota
26 % x Pendapatan Dalam Negeri Neto pada APBN	10 % x 26 % x Pendapatan Dalam Negeri Neto pada APBN	90 % x 26 % x Pendapatan Dalam Negeri Neto pada APBN
	DAU Suatu Provinsi =	
	$\{ (\text{Bobot Provinsi Bersangkutan}) / (\text{Bobot Seluruh Provinsi di Indonesia}) \} \times \text{DAU Untuk Provinsi}$	
	DAU Suatu Kabupaten / Kota =	
	$\{ (\text{Bobot Kab/Kota Bersangkutan}) / (\text{Bobot Seluruh Kab/Kota di Indonesia}) \} \times \text{DAU Untuk Kab/Kota}$	

Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu

dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Menurut Mahi (2002), tujuan pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah untuk mengurangi *inter-jurisdictional spillover* dan meningkatkan penyediaan barang publik di daerah. Sementara dalam perspektif peningkatan pemerataan pendapatan, maka peranan DAK menjadi sangat penting untuk mempercepat konvergensi antar daerah, karena dana diberikan sesuai dengan prioritas nasional, misalnya DAK untuk bantuan keluarga miskin (Waluyo, 2007).

Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (DBHPBP). Dana ini merupakan salah satu komponen dari Dana Perimbangan selain Dana Alokasi Umum (DAK) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terdapat beberapa jenis Dana Bagi Hasil seperti Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak yang bersumber dari Sumber Daya Alam. Adapun jenis-jenis penerimaan yang tergolong dalam Dana Bagi Hasil Pajak (Pasal 11 Ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004) adalah: (a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); (b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan (c) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pasal 21.

Sementara jenis-jenis penerimaan yang tergolong Dana Bagi Hasil Bukan Pajak atau Sumber Daya Alam (Pasal 11 Ayat (3) UU Nomor 34 Tahun 2004) yaitu: (a) Kehutanan; (b) Pertambangan umum; (c) Perikanan; (d) Pertambangan minyak bumi; (e) Pertambangan gas bumi; dan (f) Pertambangan panas bumi.

Pertumbuhan Ekonomi. Menurut Kuznet dalam Todaro (2003), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas ditentukan oleh kemajuan teknologi, institusional dan ideologis terhadap tuntutan keadaan yang ada. Todaro menyampaikan 3 (tiga) faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara. Ketiga faktor tersebut adalah: (1) Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.; (2) Pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.; (3) Kemajuan teknologi, berupa cara baru atau perbaikan cara-cara lama dalam menangani pekerjaan.

Case dan Fair (2007), mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan total output dalam suatu perekonomian. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi digunakan data Pendapatan Domestik Bruto (PDB) atau Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) secara riil atau atas harga konstan, karena mampu memberikan indikasi terjadinya peningkatan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dari satu periode ke periode berikutnya dibandingkan jika menggunakan PDRB nominal (Mankiew, 2007). Hanani dan Kardono (2004), pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Dalam pengertian ini terdapat 3 (tiga) aspek yang penting yaitu, proses, *output* per kapita dan jangka panjang.

Pertumbuhan ekonomi sebagai proses, berarti bahwa pertumbuhan ekonomi bukan gambaran perekonomian pada suatu saat. Sedangkan pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan output per kapita, berarti dalam memperhitungkan pertumbuhan ekonomi perlu diperhatikan 2 (dua) hal yaitu jumlah penduduk dan output total, dimana output per kapita merupakan perbandingan antara output total (PDB/PDRB) dengan jumlah penduduk.

Sementara pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan aspek jangka panjang, berarti kenaikan output per kapita itu tidak terjadi dalam waktu yang singkat tetapi harus dilihat dalam kurun waktu yang cukup lama (10, 20 atau 50 tahun bahkan bisa lebih lama lagi, Supatman (2010).

Sedangkan menurut Jhingan (1993), sesuai dengan teori pertumbuhan ekonomi dari Harrod-Domar, menyatakan bahwa investasi memiliki peranan kunci dalam pertumbuhan ekonomi yaitu menciptakan pendapatan dan memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal. Proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber daya berupa akumulasi modal, keterampilan tenaga kerja dan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan pemicu dalam laju pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan.

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Putong (2008), Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat diartikan, nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah dalam periode tertentu yang menjumlahkan semua hasil dari masyarakat daerah tersebut ditambah dengan masyarakat daerah lain yang bekerja di daerah tersebut.

Dalam perhitungan PDRB terdapat 3 (tiga) metode perhitungan atau pendekatan antara lain akan dijelaskan berikut ini.

1. Pendekatan Produksi (*Production Approach*). Digunakan untuk menentukan besarnya pendapatan nasional / daerah dengan cara menjumlahkan nilai produksi yang dihasilkan oleh sektor-sektor produktif, seperti: pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, bangunan, perdagangan restoran dan hotel, pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaan bangunan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa.

Pendekatan produksi ini dapat diformulasikan seperti berikut:

$$PDRB = \sum_{i=1}^n P_i.Q_i \dots\dots\dots 1$$

Keterangan:

i adalah sector perekonomian 1, 2, ..., n

P adalah harga dari hasil produksi sektor ke i.

Q adalah hasil produksi dari sektor ke i.

Perhitungan pendapatan dengan menggunakan pendekatan produksi ini biasa juga disebut sebagai Pendapatan Domestik Bruto (PDB) untuk skala nasional, sedangkan untuk skala daerah disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

2. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*). Perhitungan PDRB dengan cara menjumlahkan semua penerimaan atau balas jasa dari faktor-faktor produksi seperti upah (w), bunga (i), keuntungan (π) serta sewa (r). Sehingga PDRB dapat diformulasikan seperti berikut ini :

$$PDRB = w + i + \pi + r \dots\dots\dots 2$$

Keterangan :

w adalah upah sebagai balas jasa atas factor produksi tenaga kerja (SDM).

i adalah bunga sebagai balas jasa atas factor produksi modal (Kapital).

π adalah keuntungan/profit sebagai balas jasa atas faktor produksi keahlian atau kewirausahaan (*Entrepreneurship*).

r adalah sewa sebagai balas jasa atas factor produksi sumber daya alam/tanah.

3. Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*). Untuk menghitung pendapatan dengan menggunakan pendekatan ini dengan cara menjumlahkan semua pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi seperti rumah tangga (*Consumption/C*), swasta (*Investment/I*), pemerintah (*Government Expenditure/G*) dan perdagangan luar negeri (*Export/X* dan *Import/M*).

Dengan menggunakan pendekatan ini pendapatan dapat diformulasikan seperti berikut:

$$\text{PDRB} = C + I + G + (X - M) \dots\dots\dots 3$$

Keterangan: C adalah konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga.; I adalah investasi yang dilakukan oleh pihak swasta.; G adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan.; X adalah ekspor.; M adalah impor.

Tinjauan Penelitian Terdahulu. Brata (2004) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) komponen penerimaan daerah yang memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Sumbangan dan Bantuan. Namun hasil penelitian Brata belum mencakup periode setelah diberlakukannya otonomi daerah, sehingga dimungkinkan PAD akan memiliki hubungan negative dengan pertumbuhan ekonomi jika daerah terlalu berambisi untuk meningkatkan PADnya, karena akan menimbulkan dan mendorong terjadinya ekonomi biaya tinggi di daerah.

Hasil penelitian Brata ini, diperkuat oleh hasil penelitian Simanjuntak (2006) menunjukkan bahwa variabel PAD dan DAU memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang dinilai dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan harga konstan di Kabupaten Labuhan Batu. Selanjutnya hasil penelitian Saragih (2006) mencoba menganalisis pengaruh keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan hasil bahwa variabel PAD, DBH dan DAU memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun.

Penelitian lain yang mencoba untuk melihat faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi adalah penelitian Adi (2006) yang memperlihatkan bahwa desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Lin dan Liu (2000) yang menghasilkan hubungan positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian Pujiati (2008) menyimpulkan bahwa PAD dan DBH memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi namun variabel DAU memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya semakin meningkat DAU akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi semakin berkurang.

Supatman (2010), dalam tesisnya menghasilkan bahwa variabel DAU, PAD dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun secara parsial, hanya DAU dan Belanja Modal yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara PAD mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Helms (1985) dengan menggunakan data panel antar negara menunjukkan kenaikan pajak pusat dan pajak daerah berdampak memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah, jika penerimaan pajak digunakan sebagai dana perimbangan pusat-daerah. Kesimpulan yang didapat, bahwa pemberian insentif dana perimbangan berdasarkan pengeluaran lebih baik dibandingkan berdasarkan penerimaan pajak. Ismal (2002), mencoba melihat dari sudut lain yaitu sisi otoritas moneter, dimana ditemukan mekanisme transfer keuangan antara pusat-daerah akan berpotensi menimbulkan permasalahan dalam operasi

pengendalian moneter. Dengan desentralisasi fiskal akan cenderung menimbulkan risiko perubahan perilaku pengendalian fiskal di daerah-daerah. Jika pemerintah daerah mengalokasikan dananya tersebut untuk memperkuat fundamental perekonomian daerah, maka akan memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun jika dana transfer tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, spekulatif dan konsumtif yang akan menimbulkan *idle money*, maka akan memberikan dampak terhadap pengendalian moneter (terutama terhadap jumlah uang beredar). Temuan ini mendukung hasil penelitian sebelumnya di China bahwa desentralisasi ekonomi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi bersifat *inflationary* (Brandt dan Zhu, 2000).

Penelitian Yose Rizal Damuri dan Ari A. Perdana (dalam Sasana: 2009), menghasilkan suatu temuan dimana ekspansi fiskal memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Dampak yang paling terasa terhadap penyediaan kesehatan di sektor masyarakat miskin di perkotaan serta masyarakat bukan angkatan kerja di daerah pedesaan.

Adi (2006), dalam penelitiannya menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan PAD, namun karena pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota masih rendah, akibatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga rendah. Disamping itu ditemukan juga hubungan antara Belanja Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi secara simultan sangat signifikan dan positif pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pada penelitian Simanjuntak (2006) di Kabupaten Labuhan Batu, ditemukan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan disamping itu dengan menggunakan analisis "*time lag*" dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi sebelumnya memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berjalan. Pujiati (2008) dalam penelitiannya di Karesidenan Semarang, menyimpulkan bahwa PAD dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAU mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

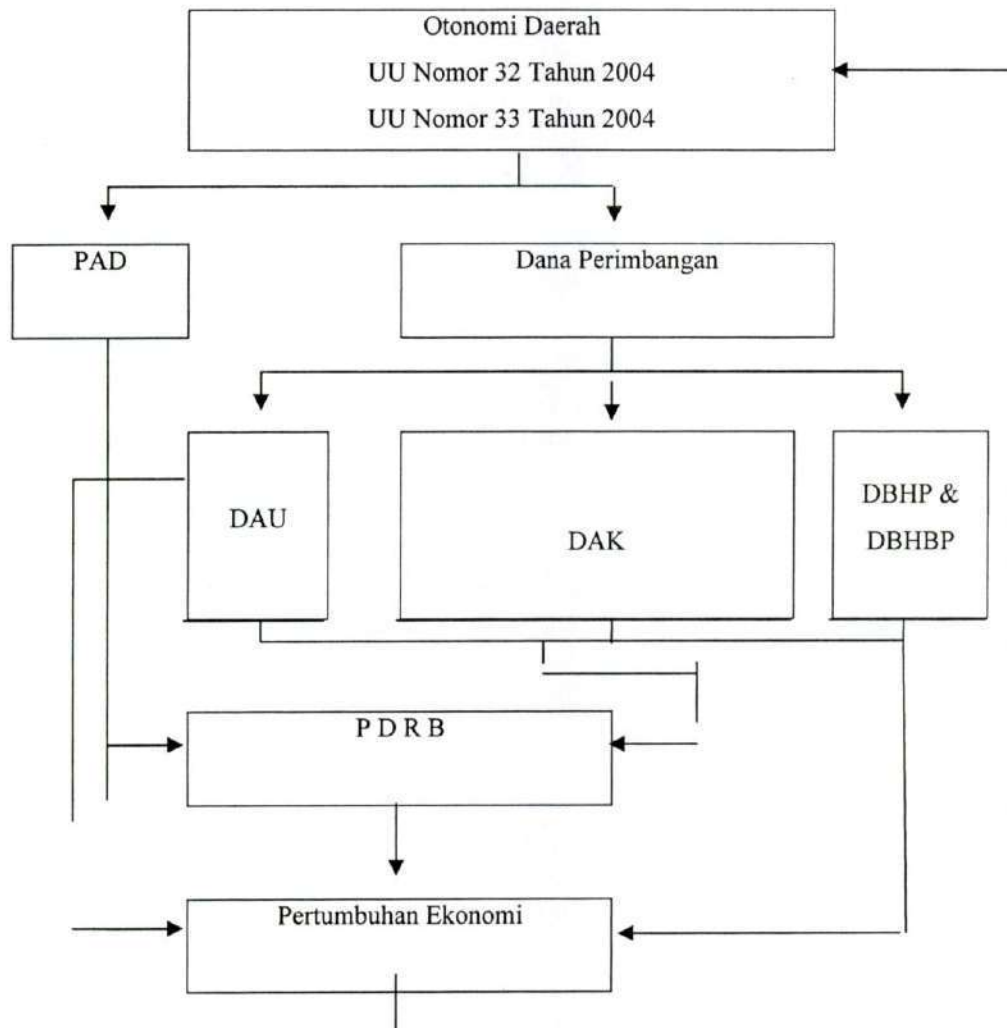
Penelitian Bangun (dalam Supatman: 2010) terhadap 101 pemerintah Kabupaten/Kota yang tersebar di pulau Sumatera, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan per kapita, sedangkan Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan per kapita.

Hasil penelitian Sasana (2009), menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta mempunyai hubungan yang positif. Sementara penelitian Waluyo (2007), menjelaskan bahwa salah satu komponen Dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai pembentuk derajat desentralisasi fiskal memiliki pengaruh yang dominan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Supatman (2010), dengan menggunakan 209 pemerintah Kabupaten /Kota di Indonesia menemukan, bahwa DAU, PAD dan Belanja Modal secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan secara parsial, DAU dan PAD sama-sama memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kecuali Belanja Modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kerangka Pemikiran. Penelitian ini mempunyai 6 (enam) variabel yaitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi

Hasil Pajak dan Bukan Pajak (DBHPBP), Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi daerah (G). Kesemua variabel ini memiliki keterkaitan yang akan menentukan pengaruh atau hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.



Gambar 1: Kerangka Pemikiran Penelitian

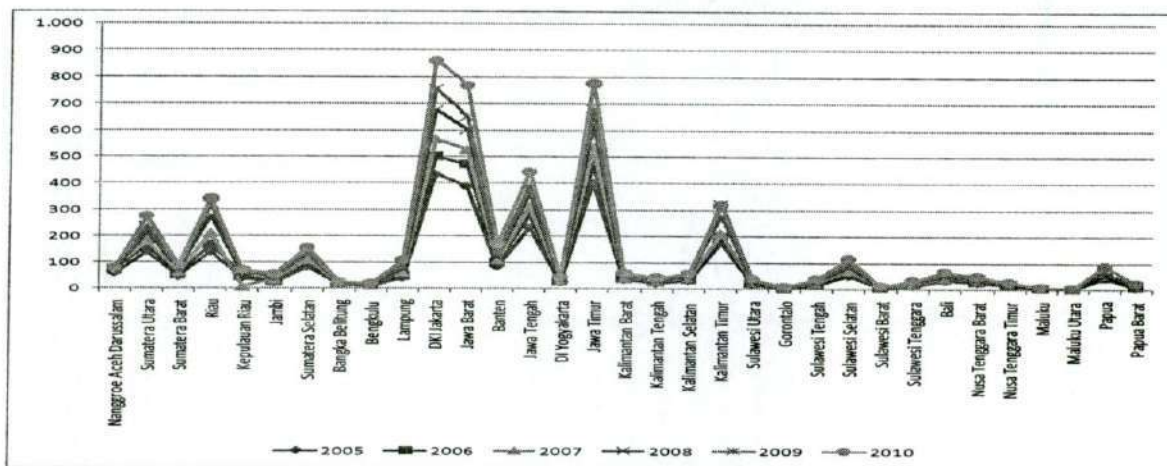
Hipotesis. Berdasarkan teori-teori, hasil penelitian sebelumnya yang relevan dan kerangka pemikiran penulis diatas dapat dikemukakan hipotesis penelitian seperti berikut: (1) Hipotesis untuk permasalahan pertama dalam penelitian ini adalah: Ada hubungan dan pengaruh yang positif dan signifikan antara PAD, DAU, DAK serta DBHP/DBHBP terhadap PDRB.; (2) Hipotesis untuk permasalahan kedua dalam penelitian ini adalah : Ada hubungan dan pengaruh yang positif dan signifikan antara PAD, DAU dan PDRB serta DBHP/DBHBP terhadap Pertumbuhan Ekonomi (G).

HASIL DAN PEMBAHASAN

H.1 Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Selama periode penelitian dari tahun 2005 sampai 2010 sebanyak 17 provinsi (52 %) dari 33 provinsi yang

ada mengalami peningkatan PDRB lebih rendah dari peningkatan PDB. Peningkatan yang paling rendah dialami oleh provinsi Nanggroe Aceh Darussalam rata-rata sebesar 6,36 % per tahun, hal ini disebabkan oleh masih belum pulihnya perekonomian NAD secara keseluruhan akibat bencana Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004. Sementara provinsi Papua Barat mengalami pertumbuhan yang paling tinggi dibandingkan provinsi-provinsi yang lainnya sebesar 23,27 % diikuti oleh provinsi Lampung sebesar 21,27 %.

Perkembangan PDRB, ini lebih didominasi oleh provinsi-provinsi yang berada di pulau Jawa serta pulau Sumatera, seperti provinsi Sumatera Utara, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan untuk wilayah Indonesia Bagian Timur pulau Kalimantan memiliki perkembangan PDRB yang cukup tinggi seperti yang terjadi di provinsi Kalimantan Timur. Selengkapnya dapat dilihat dari gambar berikut ini:



Gambar 2: Perkembangan PDRB per provinsi 2005 – 2010

Sumber: diolah

Secara umum kontribusi setiap provinsi terhadap pembentukan PDB mengalami penurunan selama periode analisis, hanya beberapa provinsi saja yang mengalami peningkatan dalam sumbangannya terhadap PDB seperti, provinsi Riau dari 5,207 % pada tahun 2005 menjadi 6,484 % pada tahun 2010, provinsi Jambi meningkat dari 0,842 % menjadi 1,018 % di tahun 2010, untuk pulau Sumatera.

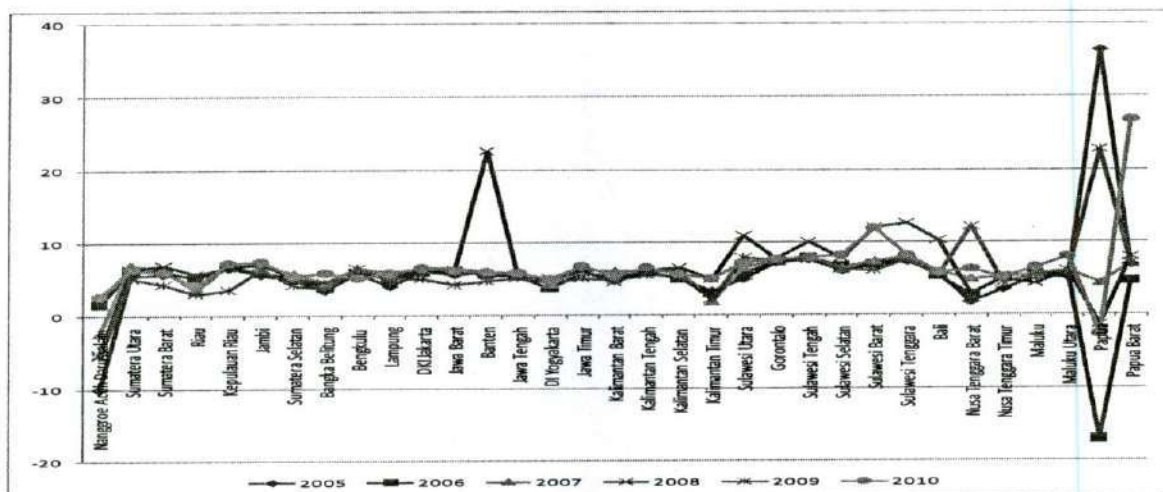
Untuk pulau Jawa provinsi yang mengalami peningkatan yaitu provinsi Jawa Barat dan Banten masing-masing mengalami peningkatan dari 14,580 % menjadi 14,582 % untuk provinsi Jawa Barat dan 3,170 % menjadi 3,227 % untuk provinsi Banten. Sementara untuk wilayah timur Indonesia peningkatan dialami oleh provinsi Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Melihat perkembangan ini dapat dikatakan peranan dari provinsi-provinsi yang ada di wilayah Indonesia Timur terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan sudah mulai memberikan dampak yang cukup berarti dan signifikan, Meskipun secara total kemampuan provinsi-provinsi di wilayah Indonesia Timur secara umum masih lebih rendah dibandingkan provinsi-provinsi yang berada di wilayah Indonesia Barat.

Selama periode analisis pertumbuhan ekonomi setiap provinsi secara umum memiliki pertumbuhan rata-rata antara 3 – 8 %, namun untuk provinsi-provinsi tertentu mengalami pertumbuhan yang relatif ekstrim seperti yang dialami oleh provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selama periode analisis mengalami penurunan sebesar 10,12 % pada

tahun 2005, tetapi pertumbuhan ini semakin membaik pada tahun 2010 sebesar 2,64 %. Hal ini diakibatkan karena provinsi Nanggroe Aceh Darussalam belum mampu membenahi perekonomiannya secara keseluruhan akibat terjangan bencana Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004.

Selain provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, provinsi yang mengalami pertumbuhan yang ekstrim adalah provinsi Banten pada tahun 2008 mampu tumbuh sebesar 22,53 % dan kembali melambat pada tahun 2010 sebesar 5,94 %. Provinsi Papua mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dari penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 17,14 % pada tahun 2006, meningkat sampai pertumbuhan ekonomi sebesar 22,74 % pada tahun 2009, sekalipun angka ini lebih rendah dibandingkan pada tahun awal analisis sebesar 36,40 %. Namun perekonomian provinsi Papua kembali mengalami kemerosotan pada tahun 2010 sebesar 2,65 %. Secara lengkap dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 3: Pertumbuhan Ekonomi per provinsi 2005 – 2010

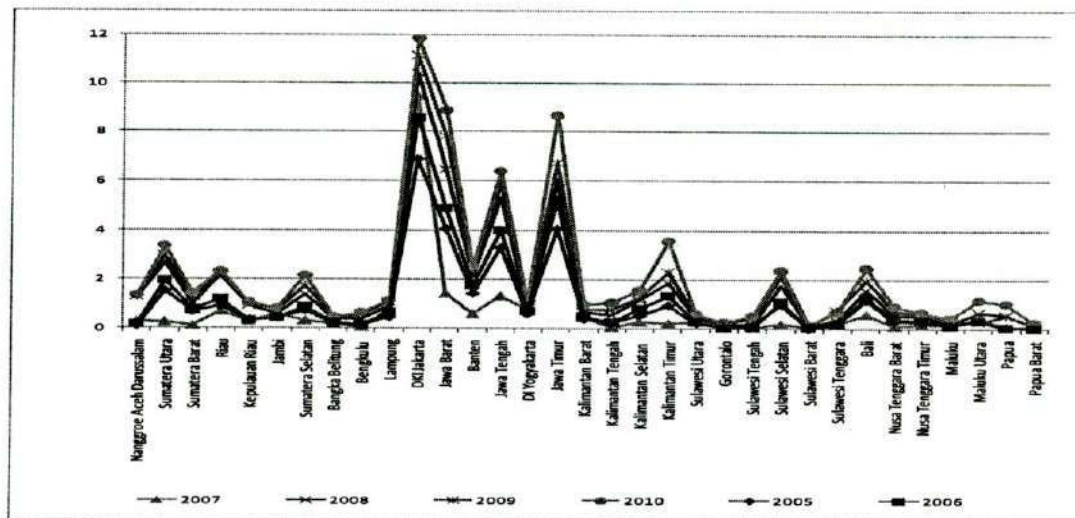
Sumber: diolah

H.2. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini diharapkan dapat menjadi tulang punggung dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah secara umum selama periode penelitian mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan angka rata-rata 25,08 %. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan daerah untuk meningkatkan serta menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah sudah mulai mengalami peningkatan.

Peningkatan yang sangat tinggi terjadi di provinsi paling ujung timur dari wilayah Indonesia dan ujung paling barat yaitu provinsi Papua dan Nanggroe Aceh Darussalam masing-masing mengalami peningkatan selama periode analisis sebesar 74,42 % dan 69,76 %. Peningkatan yang rendah terjadi pada provinsi DKI Jakarta sebesar 11,33 % diikuti oleh Banten sebesar 12,04 %.

Meskipun provinsi DKI Jakarta selama periode analisis mengalami peningkatan yang paling rendah dibandingkan provinsi-provinsi lainnya, namun secara nilai total PAD, provinsi DKI Jakarta masih mendominasi penerimaan PAD dibandingkan provinsi-provinsi yang lain dengan nilai sebesar Rp. 6,913 trilyun pada tahun 2005, meningkat menjadi Rp. 11,825 trilyun pada tahun 2010, diikuti oleh provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 4,049 trilyun pada tahun 2005 menjadi Rp. 8,913 trilyun pada tahun 2010 dan provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 4,055 trilyun pada tahun 2005 menjadi Rp. 8,687 trilyun pada

tahun 2010. Sedangkan penerimaan provinsi-provinsi yang lain secara umum rata-rata dibawah Rp. 4 trilyun pada tahun 2005 dan meningkat menjadi di bawah Rp. 8 trilyun pada tahun 2010. Lebih lengkap dapat diperhatikan gambar berikut:



Gambar 4: Perkembangan PAD per provinsi 2005 – 2010

Sumber: diolah

H.3. Perkembangan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selama periode penelitian terlihat perkembangan pemberian DAK ini terhadap provinsi-provinsi di Indonesia, dimana provinsi Riau secara ekstrim mengalami peningkatan rata-rata sebesar 102,88 %, namun provinsi Maluku Utara terjadi penurunan sekitar 16,84 %. Setelah provinsi Riau, provinsi yang mengalami peningkatan yang tinggi dalam penerimaan DAK adalah provinsi Bangka Belitung sebesar 84,61 % diikuti oleh provinsi Jawa Barat sekitar 71,29 %. Secara umum rata-rata peningkatan penerimaan DAK selama periode analisis sebesar 39,01 %.

Pemberian DAK ini masih didominasi oleh provinsi-provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, tetapi pemberian DAK ini juga diberikan dengan jumlah yang cukup tinggi untuk provinsi-provinsi yang berada di wilayah Indonesia Bagian Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah sudah mulai memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian di wilayah Indonesia Bagian Timur, dengan meningkatkan pemberian DAK ini ke wilayah tersebut. Jika ini dapat digunakan sesuai dengan aturan, maka konvergensi antar daerah dapat dikurangi dengan cepat.

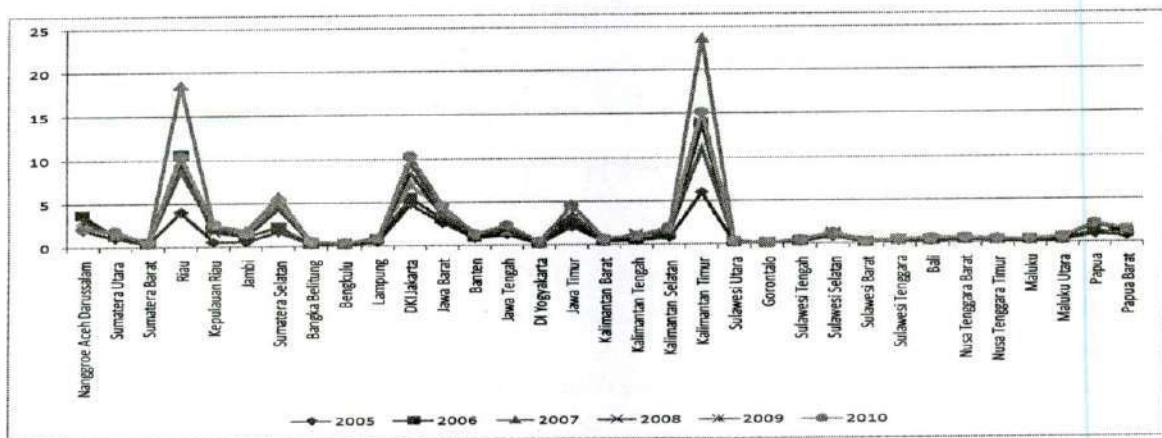
H.4. Perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU). Selama periode penelitian, pertumbuhan rata-rata penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh setiap provinsi sebesar 14,82 % dengan pertumbuhan yang tertinggi diterima oleh provinsi Papua sebesar 27,12 % dan yang terendah adalah provinsi Kalimantan Timur sebesar - 2,69 %.

Sementara secara total, penerimaan DAU bagi beberapa daerah seperti provinsi Jawa Timur rata-rata sebesar Rp. 17,878 trilyun, diikuti oleh Jawa Tengah sekitar Rp. 16,805 trilyun dan Jawa Barat sebesar Rp. 15,097 trilyun, dan beberapa daerah lainnya masih relative sangat tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketergantungan daerah terhadap pusat masih cukup tinggi.

Sedangkan untuk provinsi DKI Jakarta karena tidak tersedianya data pada tahun 2010, sehingga hanya dihitung pertumbuhan rata-ratanya selama 3 tahun sebesar - 60,47

%. Hal ini dapat terjadi karena, bagi provinsi DKI Jakarta yang memiliki PAD yang paling tinggi dibandingkan provinsi-provinsi lainnya sehingga dana bantuan dari pemerintah pusat sudah dapat dikurangi pemberiannya, sebab provinsi DKI Jakarta mampu membiayai pembangunan daerahnya dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam tataran konsep otonomi daerah, seharusnya kondisi seperti provinsi DKI Jakarta ini harus dicontoh oleh provinsi-provinsi lainnya sehingga harapan dari otonomi daerah untuk mewujudkan daerah yang mandiri dapat terpenuhi.

H.5. Perkembangan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (DBHPBP). Selama penelitian provinsi yang menikmati penerimaan DBHPBP terbesar adalah provinsi Kalimantan Timur, diikuti oleh DKI Jakarta dan Riau. Namun untuk provinsi DKI Jakarta, dana bagi hasil lebih banyak diperoleh dari hasil pajak, sementara provinsi Kalimantan Timur lebih banyak bersumber dari hasil kekayaan alam (kehutanan) sedangkan Riau dari hasil pertambangan. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut:



Gambar 5: Perkembangan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak per provinsi 2005 – 2010

Sumber: diolah

H.6. Hasil Pengolahan Data. Model yang akan diuji dalam penelitian ini adalah bagaimana PDRB dipengaruhi oleh PAD, DAK, DAU serta DBHPBP, dan bagaimana Growth dipengaruhi oleh PAD, PDRB, DAU dan DBHPBP, sehingga dapat dibangun model seperti berikut:

$$\text{PDRB} = f(\text{PAD}, \text{DAK}, \text{DAU}, \text{DBHPBP})$$

$$\text{PDRB}_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 \text{PAD}_{it} + \beta_2 \text{DAU}_{it} + \beta_3 \text{DAK}_{it} + \beta_4 \text{DBHPBP}_{it} + \varepsilon_{it}$$

$$G = f(\text{PAD}, \text{DBHPBP}, \text{PDRB}, \text{DAU})$$

$$\text{Growth}_{it} = \delta_{it} + \gamma_1 \text{PAD}_{it} + \gamma_2 \text{DBHPBP}_{it} + \gamma_3 \text{PDRB}_{it} + \gamma_4 \text{DAU}_{it} + u_{it}$$

Pendekatan yang digunakan dalam pengujian model ini dengan membandingkan antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Model yang dipilih akan ditentukan dengan menggunakan uji Hausmann (*Hausmann Test*).

Setelah melalui beberapa tahap pengujian dengan pendekatan ekonometrika, model yang pilih untuk analisis adalah:

Tabel 3. Fixed Effect Model (FEM)

$$PDRB_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DAK_{it} + \beta_4 DBHPBP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	36026595	3745502.	9.618630	0.0000
PAD?	24.11850	5.922742	4.072185	0.0001
DAK?	-1.172955	8.127260	-0.144324	0.8854
DAU?	6.180111	1.899588	3.253396	0.0014
DBHPBP?	4.415034	2.019541	2.186158	0.0303
R-squared	0.979414	Mean dependent var		1.13E+08
Adjusted R-squared	0.974705	S.D. dependent var		93170437
S.E. of regression	19242438	Sum squared resid		5.67E+16
F-statistic	207.9799	Durbin-Watson stat		1.462084
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Diolah

Tabel 4. Fixed Effect Model (FEM)

$$Growth_{it} = \delta_{it} + \gamma_1 PAD_{it} + \gamma_2 DBHPBP_{it} + \gamma_3 PDRB_{it} + \gamma_4 DAU_{it} + u_{it}$$

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.730999	0.554077	3.124116	0.0021
PDRB?	0.531444	0.073701	7.210810	0.0000
PAD?	-1.66E-08	3.22E-09	-5.153616	0.0000
DAU?	1.56E-08	3.77E-09	4.129355	0.0001
DBHPBP?	4.12E-08	4.60E-09	8.956946	0.0000
R-squared	0.994184	Mean dependent var		10.16903
Adjusted R-squared	0.992825	S.D. dependent var		7.388273
S.E. of regression	0.078452	Sum squared resid		0.947819
F-statistic	731.2543	Durbin-Watson stat		2.022431
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Diolah

Setelah dilakukan beberapa pengujian yang diperlukan dalam analisis terhadap model yang dibangun/diperoleh, dapat diambil beberapa kesimpulan umum untuk Sub Struktur model I yaitu: **Pertama**. Setiap terjadi perubahan pada PAD sebesar 1 unit akan meningkatkan PDRB sebesar 24,12 unit atau sebaliknya. Artinya terdapat hubungan dan pengaruh yang positif antara PAD dengan PDRB. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Brata (2004), Simanjuntak (2006), Pujiati (2008), Saragih (2006) dan Bangun (dalam Supatman 2010). Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil temuan dari Helms (1985), Supatman (2010) yang sama-sama menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara PAD dengan PDRB. **Kedua**. Hubungan dan pengaruh DAK terhadap PDRB secara statistik tidak signifikan dan negatif, yang artinya semakin meningkat DAK, akan menyebabkan PDRB semakin berkurang. Artinya jika DAK ditingkatkan sebesar Rp. 1 juta, maka PDRB akan berkurang sebesar Rp. 1,17 juta atau sebaliknya. Hasil ini sejalan dengan penelitian Bangun (dalam Supatman 2010). Hubungan ini dapat dikatakan, pemberian DAK kepada daerah tidak mampu mendorong terjadinya peningkatan terhadap PDRB, kondisi ini dapat dimaklumi, karena saat ini penggunaan DAK masih belum mampu menyentuh perekonomian sampai pada tingkat yang lebih rendah. **Ketiga**. Terdapat hubungan dan pengaruh yang positif dan signifikan dari DAU terhadap PDRB. Hal ini berarti, jika terjadi peningkatan DAU sebesar Rp. 1 juta, akan meningkatkan PDRB sebesar Rp. 6,18 juta atau sebaliknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak (2006), Saragih (2006), Waluyo (2007), Supatman (2010) dan Bangun (dalam Supatman 2010). Sementara hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pujiati (2008) yang menemukan bahwa hubungan dan pengaruh DAU terhadap PDRB adalah negatif. **Keempat**. Hasil yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah, bahwa setiap terjadi kenaikan DBHPBP (Dana Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak) oleh daerah sebesar Rp. 1 juta akan mampu meningkatkan PDRB daerah sebesar Rp. 4,32 juta atau sebaliknya. Hubungan dan pengaruh ini secara statistik signifikan. Penelitian ini memperkuat hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Saragih (2006) dan Pujiati (2008).

Dari Sub Struktur model II dapat ditarik beberapa kesimpulan umum seperti berikut: **Pertama**. Setiap terjadi kenaikan PAD sebesar 1 unit akan menurunkan pertumbuhan ekonomi daerah sebesar $1,66 \times 10^{-8}$ unit atau sebaliknya. Hasil penelitian ini membuktikan dugaan Brata (2004), bahwa jika penelitian tentang pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi dilakukan setelah periode otonomi daerah diberlakukannya. Brata menduga hubungan antara PAD dengan pertumbuhan ekonomi daerah dapat menjadi negatif, jika daerah terlalu berambisi untuk meningkatkan PADnya, sekalipun hasil penelitian Brata pada tahun 2004 menemukan hubungan positif antara PAD dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini berbeda hasilnya dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Brata (2004), Simanjuntak (2006), Saragih (2006), Adi (2006), Pujiati (2008), dan Bangun (dalam Supatman 2010), dimana penelitian-penelitian ini menemukan hubungan yang positif antara PAD dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Helms (1985) dan Supatman (2010). **Kedua**. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara Dana Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak (DBHPBP) dengan pertumbuhan ekonomi daerah (Growth), artinya setiap terjadi kenaikan DBHPBP sebesar 1 unit, akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat sebesar $4,12 \times 10^{-8}$ unit, atau sebaliknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian-penelitian lainnya yang dilakukan oleh, Saragih (2006) dan Pujiati (2008). **Ketiga**. Pengaruh PDRB terhadap pertumbuhan

ekonomi daerah dalam penelitian ini ditemukan memiliki hubungan yang positif dan signifikan, dimana setiap terjadi peningkatan PDRB sebesar 1 % akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 0,53 % atau sebaliknya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang terdahulu, yang tidak/belum pernah melihat keterkaitan antara PDRB dengan pertumbuhan ekonomi. **Keempat.** Sementara hubungan antara DAU dengan pertumbuhan ekonomi daerah ditemukan hasil, bahwa semakin meningkat penerimaan DAU bagi daerah sebesar 1 unit akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sebesar $1,56 \times 10^{-8}$ unit, atau sebaliknya. Hasil temuan ini sama dengan temuan dari Lin dan Liu (2000), Brandt dan Zhu (2000), Ismal (2002), Saragih (2006), Simanjuntak (2006), Adi (2006), Waluyo (2007), Sasana (2009) dan Bangun (dalam Supatman 2010). Sedangkan hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Pujiati (2008) dan Supatman (2010). Secara matrik dapat digambarkan hasil pengolahan data seperti tabel berikut:

Tabel 5. Hasil Ringkasan Model Penelitian

VARIABEL		EKSOGEN						
		C	PDRB	PAD	DAK	DAU	DBHPBP	
E N D O G E N	PDRB	36.026.595		24,12	-1,17	6,18	4,32	$R_{\text{square}} =$
	SE	3.745.502		5,922742	8,127260	1,899588	2,019541	0,979414
	t _{statistik}	9,61863		4,072185	-0,144324	3,253396	2,186158	F _{statistik} =
								2,079.799
	GROWTH	1,73	0,53	$-1,66 \times 10^{-8}$		$1,56 \times 10^{-8}$	$4,12 \times 10^{-8}$	$R_{\text{square}} =$
	SE	0,554077	0,073701	$3,22 \times 10^{-9}$		$3,77 \times 10^{-9}$	$4,60 \times 10^{-9}$	0,994184
	t _{statistik}	3,124116	7,21081	-5,153616		4,129355	8,956946	F _{statistik} =
								731,2543

Sumber: Diolah

PENUTUP

Terdapat hubungan dan pengaruh yang signifikan dan positif antara Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak (DBHPBP) dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun Dana Alokasi Khusus (DAK) secara statistik tidak signifikan mempengaruhi PDRB dan pengaruhnya terhadap PDRB juga negatif. Besarnya kontribusi dari variabel bebas (PAD, DAU, DAK dan DBHPBP) terhadap variabel terikat (PDRB) secara bersama-sama sebesar 97,50 %, sedangkan pengaruh variabel lain diluar model sekitar 2,50 %.

Pertumbuhan ekonomi daerah (*Growth*) secara positif dan signifikan dipengaruhi oleh Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), Dana Alokasi Umum (DAU) dan DBHPBP, namun memiliki hubungan dan pengaruh yang negatif dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekalipun signifikan secara statistik. Sumbangan yang diberikan oleh PDRB, DAU, DBHPBP dan PAD secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (*Growth*) sekitar 99,30 % dan sisanya sekitar 0,70 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

DAFTAR RUJUKAN

- Adi, Priyo Hari (2006). Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa – Bali) *SNA IX* Padang 23 – 26 Agustus 2006.
- Al-Rasyid, Harun (1994). Analisis Jalur (Path Analysis) Sebagai Sarana Statistika Dalam Analisis Kausal, LP3S Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Arikunto (2004). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arsyad, Lincolin (1999). Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Bastian, Indra (2001). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Brandt, Loren dan Zhu, Ziadong (2000). Redistribution in a Decentralized Economy: Growth and Inflation in China Under Reform, *The Journal of Political Economy* Volume 108, Issue 2, April.
- Brata, Aloysius Gunadi (2004). Komposisi Penerimaan Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Regional, Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Case, Karl E & Ray C. Fair (2007). Prinsip-Prinsip Ekonomi, Alih Bahasa Y. Andri Zaimur, SE, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Cooper, Donald R & Pamela S. Schindler (2008). Business Research Method. Mc.Graw Hill, New York.
- Gujarati, Damodar N (2003). Basic Econometrics, Fourth Edition, McGraw Hill International Edition.
- Halim, Abdul (2001). Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul (2002). Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul (2004). Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi, Jakarta: Salemba Empat.
- Hanani, Nuhfil dan Kardono (2004). Teori Ekonomi Makro Pendekatan Grafis dan Matematis, Malang.
- Helms, Jay L (1985). The Effect of State and Local Taxes on Economic Growth: A Time Series – Cross Section Approach, Dalam Wallace E Oates (Ed) *The Economics of Fiscal Federalism and Local Finance*, Edward Elgar, Centelham, United Kingdom.
- Ismal, Rifki (2002). Penelitian Tentang Apakah Penerapan Otonomi Daerah Khususnya Alokasi Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah (PKPD) dan Non PKPD Selama Tahun 2001 Telah Memberikan Dampak Kepada Pengendalian Moneter? *Buletin Ekonomi dan Moneter*, Volume 5 Nomor 2.
- Jhingan, M.L. (1993). Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kaloh, J (2002). Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kuncoro, Mudrajad (2001). Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi (Cetakan I), Yogyakarta: AMP YKPN.
- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu (2000). Fiscal Decentralization and Economic Growth in China, *Economic Development and Cultural Change*, October 2000, ABI/INFORM Global.
- Mahi, Raksaka (2002). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah, Makalah disampaikan dalam Kursus Reguler Angkatan XXXV, LEMHANAS, 25 Agustus 2002, Jakarta.

- Mahi, Raksaka (2005). Peran Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi Daerah, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Volume 6, Nomor 1 Juli.
- Mankiw, Gregory N (2007). Makroekonomi, Alih Bahasa Fitria Liza, SE dan Imam Nurmawan, SE, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo (2002). Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nanga, Muana (2005). Analisis Posisi Fiskal Kabupaten/Kota di NTT: Adakah Posisi Fiskal Pasca Otonomi Daerah Lebih Baik?, *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin* 17 (2 – 3), Agustus – Desember 2005, 159 – 175.
- Nawari (2010). Analisis Regresi Dengan MS. Excel 2007 dan SPSS 17.0, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nazir, Moh. (200). Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ndadari, Laras Wulan dan Priyo Hari Adi (2008). Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah Terhadap Transfer Pemerintah Pusat, The Second National Conference UKWSW, Surabaya, 6 September 2008.
- Pujiati, Amin (2008). Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 61 – 70.
- Putong, Iskandar & Nuring Dyah Andjaswati (2010). Pengantar Ekonomi Makro, Edisi Kedua, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Riduwan dan Engkos Achmad Kuncoro (2008). Cara Menggunakan dan Memaknai Analisis Jalur (Path Analysis), Bandung: Alfabeta.
- Saragih, Jan Warner (2006). Analisis Pengaruh Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun, *Tesis S2 Universitas Sumatera Utara*, Medan.
- Sasana, Hadi (2009). Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Volume 10, Nomor 1, Juni 2009, Hal. 103 – 124.
- Sidik, Machfud (2002). Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia), Yogyakarta.
- Simanjuntak, Dasan (2006). Analisis Pengaruh PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Labuhan Batu, *Tesis S2 Pascasarjana Universitas Sumatera Utara*, Medan.
- Sugiyono (2005). Statistika Untuk Penelitian, Bandung: CV Alfabeta, Bandung.
- Supatman (2010). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening, *Tesis S2 Pascasarjana, Universitas Padjadjaran*, Bandung.
- Supranto, J (2005). Ekonometri, Buku Satu, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro, Michael P. (2000). Economic Development, Seventh Edition, Addition Wesley Longman, Inc., New York
- Todaro, Michael P. And Smith Stephen C., (2003). Economic Development, Eighth Edition, Pearson Education Limited, United Kingdom.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Waluyo, Joko (2007). Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Indonesia, Parallel Session IA; Fiscal Decentralization 12 Desember 2007, Wisma Makara, Kampus UI-Depok.
- Winarto, Wing Wahyu (2009). Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews, Edisi Kedua, Jogjakarta: UPP STIM YKPN.
- Wong, John D (2004). The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity, *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, Volume 16 (3), 799 – 816.
- World Bank (2003). Kota-Kota Dalam Transisi: Tinjauan Sektor Perkotaan Pada Era Desentralisasi di Indonesia, *Working Paper* Nomor 7